

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERKELANJUTAN: PERAN *KLÈBUN BABINE'* DALAM MENGINTEGRASIKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN, EKONOMI DAN SOSIAL DI PROVINSI JAWA TIMUR

Hoiril Sabariman<sup>1</sup>, Anik Susanti<sup>2</sup>, Noer Azizah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Brawijaya Malang

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Madura

*hoirilsabariman@yahoo.com, aniksusanti@ub.ac.id, azizabnoer224@gmail.com*

### **Abstract**

*The women's empowerment program in rural Madura is hampered by the demarcation line drawn up by Patriarchic culture. The emergence of a female village head in Madura is called "Klèbun Babine" as a form of empowerment that pays more attention to women. This article tries to explain the role of the "Klèbun Babine" in empowering women, then what are the "Klèbun Babine" programs' in empowering women in rural areas. Kualitatif deskriptif is using to methodology reaserch. Informant in definite base purposive sampling. Data collect by direct observations and interviews were carried out in the village Ponteh. The data shows that the Ponteh community saw the role of the "Klèbun Babine" in empowerment was very visible. "Klèbun Babine" conducts empowerment activities on its own, often even incurs personal expenses. Some "Klèbun Babine" programs in empowering women in rural areas, first; is the women's group savings and loan (SPKP) activity. Second, health activities for women. third, optimization of the PKK program. fourth, postponement of marriage age for adolescent girls. The five trainings are to maintain a clean and healthy environment. The scientific contribution of this article is, optimizing the role of the "Klèbun Babine" as a model of empowering women in rural Madura.*

**Keywords:** *Empowerment, Women, Klèbun Babine', Rural*

### **Abstrak**

Selama ini program pemberdayaan perempuan di perdesaan Madura terhambat oleh garis demarkasi yang dibuat oleh budaya Patriarki. Perempuan sebatas peran rumah tangga, tanpa harus terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, pendidikan, politik dan kesehatan. Munculnya kepala desa perempuan dalam bahasa Madura disebut *Klèbun Babine'* memberikan harapan baru terhadap kaum perempuan di perdesaan. Salah satu bentuk nyata berupa pemberdayaan yang lebih memperhatikan kaum perempuan. Artikel ini menjelaskan peran *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan, kemudian apa saja program *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Data didapat dari pengamatan langsung dan wawancara dilakukan di Desa Ponteh. Data menunjukkan, masyarakat di Desa Ponteh melihat peran *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan sangat baik. *Klèbun Babine'* melakukan sendiri kegiatan pemberdayaan, bahkan sering mengeluarkan biaya pribadi untuk kegiatan tersebut. Beberapa program *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di pedesaan, pertama; kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP). Kedua, kegiatan kesehatan bagi kaum perempuan. Ketiga, optimalisasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keempat, penundaan usia nikah bagi remaja perempuan. Kelima, pelatihan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah menjelaskan lebih lanjut tentang peran *Klèbun Babine'* sebagai model pemberdayaan perempuan di perdesaan Madura.

**Kata kunci:** *Pemberdayaan, Perempuan, Klèbun Babine', Pedesaan*

## PENDAHULUAN

Kesenjangan aksesibilitas, informasi, sarana dan prasarana di perkotaan dan pedesaan masih terasa, khususnya bagi kaum perempuan di pedesaan. Kaum perempuan khususnya di pedesaan masih mengalami marginalisasi, stereotipe, subordinat, kekerasan dan *double burden* yang dialami perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), rendahnya pendidikan perempuan serta masalah kesehatan perempuan (Syarifuddin, 2016: 69; Nelli, 2015). Perempuan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai akses tersebut. Padahal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus dicapai dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) (Hasanah: 2013: 72). Hal ini dikarenakan pembangunan tanpa berdaya kaum perempuan menandakan ketidak merataan suatu program pembangunan itu sendiri. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2018) capaian perempuan Indonesia dalam Pendidikan, kesehatan bagi kaum perempuan, peran perempuan dalam dunia kerja serta akses dan penggunaan internet pada perempuan di pedesaan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan di perkotaan. Dalam bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas di perkotaan adalah 9,21 tahun, sedangkan perempuan di pedesaan 6,96 tahun (Kemen PPPA, 2018: 1).

Perbandingan kondisi kesehatan kaum perempuan di pedesaan dan perkotaan tidak begitu tinggi. Kondisi kesehatan Perempuan sebanyak 29,32% perempuan Indonesia mempunyai keluhan kesehatan. Disagregasi menurut daerah tempat tinggal sebanyak 29,84% di perkotaan dan 29,79% terjadi pada perempuan di pedesaan. Faktor utama penyebab keluhan kesehatan adalah perilaku tidak sehat dari perempuan itu sendiri. Peran perempuan dalam dunia kerja, perempuan di perkotaan yang bekerja di sektor formal sebanyak 60,40% lebih tinggi dari pada perempuan di pedesaan sebesar 51,55%. Sedangkan akses dan penggunaan internet perempuan umur 15 tahun ke atas yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir sebanyak 74,73% di perkotaan berbanding 61,63% di pedesaan (Kemen PPPA, 2019). Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, berbagai kegiatan Pemberdayaan perempuan dan program prioritas yang dilakukan Kemen PPPA pada 2019 antara lain 1). Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di pedesaan. 2). Peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan di pedesaan. 3). Peningkatan kualitas layanan bagi perempuan di pedesaan dan yang terakhir adalah partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan (Kemen PPPA, 2019).

Keterlibatan perempuan menjadi pemimpin menjadi penting, hal ini disebabkan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang dapat dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih pada kesetaraan gender dan lebih peka terhadap persoalan perempuan (Nelli, 2015; 254). Hal ini terjadi pada kasus perempuan yang menjadi kepala desa, didapat tingkat sensitifitas terhadap fenomena-fenomena perempuan menjadi lebih diperhatikan. Misal pemberdayaan kaum perempuan di desa yang dipimpin oleh *Klèbun Babine'*.

Setelah melakukan observasi terdapat fenomena menarik, rata-rata tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi dari pada kaum laki-laki. Baik tingkat sarjana, SMA atau SMP. Kondisi usaha kecil menengah (UKM) lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan dari pada laki-laki. Misal, menjahit, pembuatan kue, serta berbagai kegiatan industri rumah tangga lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di perdesaan Madura. Apa saja program *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di perdesaan serta bagaimana program tersebut berjalan. Artikel ini menjelaskan dari sudut pandang peran *Klèbun Babine'* dalam memaksimalkan program pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh.

## METODE

Penelitian ini telah dilakukan di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Ponteh dipimpin oleh *Klèbun Babine'* (kepala desa perempuan) perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan tentang peran *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di perdesaan. Kemudian berbagai program *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh.

Informan penelitian ini ditentukan berdasarkan prinsip *purposive sampling*. penentuan informan dengan cara menetapkan ciri-ciri atau kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Informan penelitian ini adalah *Klèbun Babine'*. Perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan. Data akan dikumpulkan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan *guide interview* kepala berbagai pihak pemangku kepentingan dan pelaksana kegiatan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Juga dilakukan *Focus Group Discussions* (FGD) dengan perempuan yang terlibat oleh program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ponteh. Observasi juga dilakukan dalam proses pengumpulan data. Hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian disusun untuk dilanjutkan pada proses analisis data. Setelah data terkumpul, baik data primer dan data sekunder, langkah berikutnya adalah analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Metode analisis ini dimulai

dengan mengumpulkan data di lokasi penelitian, baik observasi atau wawancara. Kemudian mereduksi, menyajikan data yang telah terkumpul dan menarik kesimpulan. Setelah data terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis sesuai proses melalui reduksi data, penampilan data, verifikasi, serta kesimpulan (Creswell, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan dilakukan oleh *Klèbun Babine'* untuk memperbaiki individu atau masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, khususnya kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam konteks artikel ini adalah golongan tidak berdaya adalah perempuan di perdesaan Madura. *Klèbun Babine'* mampu mengubah perempuan yang tidak berdaya (pendidikan yang terhalang, kompleksitas pekerjaan, kesehatan yang terabaikan) menjadi berdaya.

### Perkembangan literatur tentang pemberdayaan perempuan

Perkembangan literatur yang membahas tentang pemberdayaan perempuan di perdesaan Indonesia setidaknya dijelaskan oleh Tahir (2011), Aslichati (2011), Saugi (2015), Putra (2015), Linda (2015), Chawa (2016), Widiyastuti (2017). Menurut Tahir (2011) supaya perempuan di perdesaan tidak menjadi golongan yang termarjinalkan, maka perempuan perlu pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif yang digunakan adalah model pendidikan untuk orang dewasa (*Androgogy*). Sehingga perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mengambil keputusan rumah tangga atau lingkungan masyarakat. Jika Tahir (2011) lebih fokus pada peningkatan kapasitas diri agar perempuan dapat berdaya, Aslichati (2011) dan Linda (2015) lebih menekankan pada peran dari organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai sarana untuk pemberdayaan perempuan di perdesaan. Sedangkan Putra (2015) lebih fokus pada keterlibatan perempuan miskin di perdesaan dalam proses pemberdayaan. Butuh kerja sama semua pemangku kebijakan untuk ikut berperan aktif dalam proses pemberdayaan perempuan di perdesaan.

Penjelasan Saugi (2015) tentang pemberdayaan perempuan di perdesaan berbeda dengan (2011), Aslichati (2011), Putra (2015). Saugi lebih menekankan pada langkah konkrit oleh perempuan lewat pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. Menurut Saugi (2015) indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di perdesaan dibuktikan dengan adanya pengembangan produk dari pengolahan bahan pangan lokal. Serta variasi produk dan terbentuknya kemandirian perempuan. Berbeda penjelasan Chawa (2016), kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan pada perempuan miskin mampu meningkatnya keyakinan atau *selfefficacy* untuk dapat mandiri secara ekonomi. Posdaya (Program pemberdayaan keluarga) menjadi wadah perwujudan dari

perempuan dari keluarga miskin tersebut. Sedangkan Widiastuti (2017) dalam proses pemberdayaan perempuan di perdesaan lebih melihat konteks masyarakat. Kondisi masyarakat agamis dengan basis pesantren, sehingga prioritas pemberdayaan di mulai dari Agama, pendidikan dan Ekonomi (APE). Widiastuti (2017) mendapatkan model pemberdayaan bagi perempuan yang tepat yaitu Kelompok Usaha Kreatif Islami (KUKIS) berbasis pondok pesantren. Sehingga program pemberdayaan yang dilakukan tidak berbenturan dengan kondisi sosial masyarakat.

Tidak hanya di Indonesia, kajian-kajian literatur tentang pemberdayaan perempuan di perdesaan telah banyak dilakukan di berbagai negara. Mahmud (2011), Imai (2014), Ganle (2015) dan Cunningham (2015). Di Bangladesh, pemberdayaan perempuan perdesaan dengan ketersediaan dan menyediakan fasilitas yang berpihak pada kaum perempuan. Selain itu, ketersediaan kredit mikro yang diikuti oleh partisipasi perempuan di dalamnya. Terakhir, subsidi khusus anak dan remaja perempuan untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga menciptakan kondisi peningkatan keberdayaan kaum perempuan di perdesaan Bangladesh (Mahmud, 2011). Sedangkan menurut Imai (2014) di perdesaan India, pemberdayaan perempuan dilakukan dengan memperluas lapangan pekerjaan di luar pilihan utama yang dapat membuat perempuan menjadi tidak berdaya (peran domestik). Sehingga perempuan dapat memiliki akses seperti kepemilikan aset sendiri, keterampilan, pendapatan konsumsi, produksi yang pada akhirnya akan mengarah pada pemberdayaan perempuan.

Sedangkan di perdesaan Ghana menurut Ganle (2015), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memberikan akses terhadap kredit mikro yang dapat meningkatkan aktifitas perempuan dalam bidang perekonomian. Akses perempuan terhadap kredit mikro menjadi langkah awal dalam proses pemberdayaan perempuan di perdesaan Ghana. Meskipun tidak langsung berdampak secara instan, pada pola pikir masyarakat yang masih didominasi budaya patriarkhi dan kondisi sosial, budaya lainya dalam mengontrol kegiatan ekonomi lainnya. Perempuan yang mendapatkan akses pada kredit mikro dapat menggunakan pinjaman untuk kegiatan produktif. Penjelasan Cunningham (2015) tentang pemberdayaan perempuan di perdesaan Nepal adalah dengan keterlibatan perempuan dalam bidang pertanian. Meskipun perkembangan teknologi pertanian sudah berkembang pesat, tapi perempuan mesti juga dilibatkan dalam berbagai proses kegiatan pertanian.

### **Kondisi Masyarakat dan Perempuan Desa Ponteh**

Kepala desa (*Klebum*) sangat dihormati dalam masyarakat. Selain itu, kedekatan kepala desa dengan warga masyarakat sangat erat mempermudah proses pemberdayaan tersebut Hal ini

dibuktikan dengan masyarakat Madura masih memegang prinsip *Bhuppa' Bhábbhu' Gburu Rato* (Bapak Ibu, guru, Raja) menjadikan orang Madura patuh (Wiyata, 2006). Raja disini diartikan sebagai pemimpin. bagi masyarakat Madura di perdesaan Kepala Desa yang dimaksud raja tersebut. Masyarakat Desa Ponteh memiliki pola interaksi sosial yang erat satu sama lain. Hal ini disebabkan masih kuatnya nilai-nilai kultur, budaya, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Misal: kegiatan membuat rumah sistem gotong royong masih diterapkan oleh sebagian besar warga. Begitu juga dengan sistem pertanian, dengan bekerja secara bergantian bagi tiap-tiap pemilik tegalan atau sawah yang dikerjakan. Kebersamaan ini terjalin sejak lama, sehingga dalam kehidupan sosial masyarakat sudah hidup saling berdampingan dan saling mengisi. Selain itu, ketika ada orang meninggal ("*Kiyafe*") semua saling membantu dan saling mengisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misal: ada bagian menggali kubur, memandikan jenazah, sampai mengantarkan jenazah ke kuburan. Kaum perempuan sebagian besar membuat kue dan makanan di dapur bagi masyarakat yang terlibat. Seperti yang dijelaskan Durkheim (Ritzer, 2012) masyarakat dengan intensitas tinggi dalam berkomunikasi dan bersama cenderung memiliki ikatan sosial yang kuat. Sehingga dalam masyarakat cenderung memiliki relasi yang kuat meskipun bukan keluarga ini. Durkheim menjelaskan masyarakat ini dengan golongan solidaritas mekanik (*mechanical solidarity*).

Ciri yang melekat pada masyarakat Desa Ponteh karena ikatan diantara masyarakat itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mirip, tanggung jawab yang mirip. Misal; saat kegiatan *hol-ngehhol* (memperingati anggota keluarga yang sudah meninggal dunia) *pa'pholo arenah bheji'* (memperingati 40 hari kelahiran bayi) *manthan* (acara pernikahan) masing-masing individu dalam masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang mirip dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat (Ritzer, 2012: 145). Berbagai kegiatan diatas, baik kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kebudayaan pada masyarakat Desa Ponteh kepala desa selalu diundang dan dilibatkan. Kedekatan antara masyarakat dan kepala desa menjadi lebih dekat.

Masyarakat Desa Ponteh sebagian besar bekerja sebagai petani, peternak, nelayan, perkebunan, buruh tani, jasa, tukang, wiraswasta dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil. Sebagian besar sebagai buruh tani sebanyak 452 orang, dengan mayoritas kaum perempuan. Tidak hanya buruh tani sebagian besar perempuan yang bekerja aktif dalam sektor ekonomi, tapi dalam bidang jasa dan industri rumah tangga perempuan juga terlibat (Profil Desa Ponteh: 2019). Kondisi pendidikan masyarakat desa Ponteh masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 892 orang, pendidikan tamat SMP sederajat 217 orang, penduduk tamat SMA sederajat 156, penduduk tamat D2 105 orang dan diikuti oleh pendidikan sarjana sebanyak 61 orang. selain pendidikan, yaitu ketersedianya tenaga kesehatan di desa Ponteh dalam penanganan kesehatan

dilakukan oleh perawat/mentri kesehatan 7 orang, bidan 2 orang, dukun 1 orang dan kader kesehatan sebanyak 15 orang (Profil Desa Donteh, 2019: 43). Sedangkan beberapa kegiatan prioritas pembangunan Desa Ponteh yang disusun dalam RKP desa tahun 2018 difokukan pada efektifitas peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup. Selain itu, pembangunan dan penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian yang diutamakan adalah pengembangan potensi lokal yang dibangun berdasarkan ekonomi dan kondisi lingkungan secara berkelanjutan (Profil Desa Ponteh: 2019).

### **Peran *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan *Klèbun Babine'* mampu mewujudkan keberdayaan kaum perempuan di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Klèbun Babine'* melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu kepala pemerintahan, fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Klèbun Babine'* melakukan sendiri kegiatan pemberdayaan khususnya bagi perempuan, bahkan sering mengeluarkan biaya pribadi untuk kegiatan warga. Seperti yang dijelaskan Ibu Dora:

*“untuk meningkatkan antusias kaum perempuan, kadang saya memberikan hadiah ketika mengadakan kegiatan khususnya bagi ibu-ibu. Hadiah saya berikan karena awalnya sulit mengajak ibu-ibu untuk hadir dalam kegiatan itu, dek” (Wawancara, 2019)*

Ibu Dora sebagai *Klèbun Babine'* berperan aktif dalam membangun desanya. Secara garis besar biaya kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh berasal dari anggaran dana desa (ADD), PNPM. Akan tetapi *Klèbun Babine'* sering mengeluarkan biaya pribadi untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Misal; untuk merangsang para perempuan supaya hadir dalam kegiatan yang sudah ditentukan. *Klèbun Babine'* memberikan bingkisan bagi setiap peserta. kemudian, *Klèbun Babine'* membuat undian hadiah saat akhir kegiatan. Hal ini dilakukan *Klèbun Babine'* karena kaum perempuan di Desa Ponteh masih belum sepenuhnya paham dan mengerti tentang konsep pemberdayaan. Sehingga langkah awal yang dilakukan adalah dengan memberikan berupa materi (kue, makanan, bingkisan) bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

Selain itu, *Klèbun Babine'* membuat program khusus pemberdayaan bagi perempuan di Desa Ponteh. *Klèbun Babine'* juga melakukan sendiri berbagai program tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Menurut *Klèbun Babine'* dengan melakukan sendiri kegiatan pemberdayaan, kaum perempuan menjadi lebih terbuka dengan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Sehingga permasalahan yang dihadapi jadi terlihat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Bagi peserta pemberdayaan, khususnya perempuan di Desa Ponteh, langkah ini berjalan baik. Kaum perempuan menjadi aktif dalam kegiatan PKK dan kegiatan pemberdayaan lainnya. *Klèbun Babine'* yang melakukan sendiri

berbagai kegiatan pemberdayaan, bahkan sampai mengeluarkan sendiri biaya pribadi dianggap mempunyai kemauan dan pengabdian yang tinggi terhadap kondisi keberdayaan perempuan di desa yang dipimpinnya.

### **Program *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di pedesaan**

Temuan penelitian tentang program pemberdayaan masyarakat di Desa Ponteh yang dilakukan *Klèbun Babine'* khusus perempuan ada berbagai macam. Fokus pemberdayaan ini lebih pada pemberdayaan non fisik terhadap kaum perempuan. Beberapa program pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh, Pertama kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP). Simpanan pinjam pokok ini dilakukan khusus untuk perempuan, baik untuk pengembangan usaha ataupun untuk berwiraswasta. Pinjaman usaha ini sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Misal; warga asli Desa Ponteh yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), memiliki usaha atau proses menjalankan usaha yang produktif dan dinilai dapat berkembang. Bunga pinjaman ini lebih kecil dari pada pinjaman di Bank, kemudian proses peminjaman ini lebih mudah. Khususnya bagi masyarakat Desa Ponteh.

Kedua, kegiatan penyuluhan kesehatan bagi perempuan. Selain program simpan pinjam kelompok perempuan, *Klèbun Babine'* membuat kegiatan penyuluhan berbagai kesehatan bagi perempuan. Kegiatan penyuluhan ini diberikan oleh dinas terkait, yaitu puskesmas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Peran aktif *Klèbun Babine'* dalam program ini adalah proses pengurusan dengan instansi terkait, hingga mempersiapkan kaum perempuan di Desa Ponteh agar berperan aktif dan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kaum perempuan di Desa Ponteh seputar kesehatan dasar bagi perempuan.

Ketiga, optimalisasi program PKK, selain menjahit dan membuat kue. Dari penjelasan informan penelitian, hal yang dirasakan manfaatnya adalah tentang pelatihan mengemas (*packaging*) olahan makan ringan dan minum. Serta pengetahuan tentang minuman dan makanan yang higienis. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemajuan dalam proses pemasaran suatu produk. Sehingga kaum perempuan di desa Ponteh dapat meningkatkan kreatifitas dan potensi diri dan lingkungan. Pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian kaum perempuan di Desa Ponteh. Bagi sebagian kaum perempuan yang ikut dalam program pemberdayaan tersebut, dampak langsung dapat terlihat. Misal Suratni, mempunyai usaha kue yang biasa didagangkan di pasar. Setelah mengikuti pelatihan tentang nilai lebih dari proses *packaging* makanan, kue yang didagangkan semakin meningkat permintaannya.

Keempat penundaan usia nikah bagi remaja perempuan. Program penundaan usia nikah bagi perempuan ini memang menjadi salah satu program prioritas *Klèbun Babine'* selama menjabat sebagai Kepala Desa. Menurut informan penelitian, hal ini didasarkan pada dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pernikahan usia muda bagi kaum perempuan. Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia muda, misal kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta dampak negatif bagi kesehatan reproduksi perempuan.

Kelima pelatihan menjaga lingkungan bersih dan sehat. *Klèbun Babine'* selalu mengadakan penyuluhan dan pelatihan untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kegiatan rutin ini dilakukan setiap enam bulan sekali. Acara penyuluhan terkadang dilakukan bersama dengan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Hal ini dilakukan mengingat kesibukan warga masyarakat Desa Ponteh, khususnya kaum perempuan. Selain kegiatan di atas, *Klèbun Babine'* juga selalu memberikan pengarahan kepada warganya supaya selalu memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kegiatan pelatihan dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat lebih difokuskan pada pengelolaan sampah. Hampir sebagian besar kondisi lingkungan di Desa Ponteh diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang kurang tepat. Baik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat (bahan plastik) atau sampah yang dihasilkan dari alam seperti daun, ranting. Bahkan *Klèbun Babine'* juga turut aktif ketika ada kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Soedarwo (2017) menjelaskan empat langkah kegiatan dalam membangun karakter menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Pertama; penyuluhan dan pelatihan tentang dampak lingkungan akibat sampah. Kedua; manfaat dari menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Ketiga; memberikan penjelasan tentang jenis sampah. Kemudian yang keempat; cara mengelola sampah dengan 3R (*Reduce* = Mengurangi, *Reuse* = pemanfaatan ulang, *Recycle* = daur ulang).

## KESIMPULAN

Studi ini mengungkap bahwa peran *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh berjalan baik. Suksesnya *Klèbun Babine'* dalam proses pemberdayaan terhadap kaum perempuan tidak lepas dari kemauan sendiri. *Klèbun Babine'* melakukan sendiri kegiatan pemberdayaan, bahkan sering mengeluarkan biaya pribadi terhadap beberapa program pemberdayaan. Loyalitas yang dilakukan oleh *Klèbun Babine'* memberikan gambaran terhadap perempuan di Desa Ponteh untuk mampu dan berdaya. Perempuan tidak lagi mengalami marginalisasi, stereotipe, subordinat, kekerasan dan *double burden* yang dialami perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), rendahnya pendidikan perempuan serta masalah kesehatan perempuan.

Beberapa program *Klèbun Babine'* dalam pemberdayaan perempuan di pedesaan, pertama; kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP). Kedua, kegiatan 128ocal128tan bagi perempuan. Ketiga, optimalisasi program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keempat, penundaan usia nikah bagi remaja perempuan. Kelima, pelatihan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Dalam melihat program pemberdayaan, khususnya di perdesaan Madura Pemerintah 128ocal harus melihat konteks budaya yang ada dalam masyarakat. Tidak hanya proaktif mengajak, memotivasi, dan memberikan penyadaran. Perlu peran aktif semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan di daerahnya, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aslichati, Lilik. 2011. Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. *Jurnal Organisasi dan Maanajemen*, 7 (1): I42-155.
- Chawa, Anif Fatma, 2016. Penerapan Progran Posdaya dalam Mewujudkan kesehatan Mental Perempuan kepala Rumah Tangga miskin. *PALASTREN*, 9 (1): 69-98.
- Cunningham, Kenda. Et.al. 2015. Women's empowerment in agriculture and child nutritional status in rural Nepal. *Public health nutrition*: 18 (17): 3134-3145. <https://doi.org/10.1017/S1368980015000683>
- Creswell, Jhon W. 2009. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. Bandung: Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ganle, Jhon Kuumuori, Kwandwo Afriyie, Alexander Yao Segbefia. 2014. Microcredit: empowerment and disempowerment of rural women in Ghana. *World Development*, 66 (1): 335-345. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.08.027>
- Imai, Katshushi S. Samuel Kobina Annim, Veena S. Kulkarni, Raghav Gaiha. 2014. Women's Empowerment and prevalence of Stunted and underweight Children in Rural India. *World Development*, 62 (1): 88-105. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.05.001>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. Profil perempuan Indonesia 2018. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Linda, Roza. 2015. Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangerang Labuai. *Marwah*, 14 (2): 161-181.
- Mahmud, Simeen. 2012 Measurement of women's empowerment in rural Bangladesh. *World development*, 40 (3): 610-619. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.08.003>

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nelli, Jummi. 2015. Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender. *Marwah*, 14 (2); 254-276.
- Putra, Ikhsan Muharma. 2011). Partisipasi semua perempuan miskin dalam program pemberdayaan masyarakat. *Kafa'ab jurnal of Gender Studies*, 5 (1): 41-59.  
<http://dx.doi.org/10.15548/jk.v5i1.113>
- Profil desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. 2019.
- Program prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. diakses <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1846/dpr-ri-gaungkan-terus-program-prioritas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak> (pada 03/09/2019 pukul 21.41 WIB)
- Ritzer. George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai perkembangan terakhir post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saugi, Wildan. Sumarno. 2015. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengelolaan bahan pangan lokal. *Jurnal Pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat*, 2 (2).  
<https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361>
- Soedarwo, Vina Saviana Darvina, Nurul Zuriah, Ratih Yulianti, Suwignyo. 2017. Pemberdayaan Masyarakat melalui pendidikan nonformal berbasis potensi lokal dalam membangun desa wisata adat. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2 (2): 97-102.
- Syarifuddin, Oryza Pneumatica I, Nuning Juniarsih, M. Rasyidi. 2016. Pemberdayaan Masyarakat desa terdampak pembangunan bandara International Lombok Raya. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1 (1): 57-70.
- Tahir, Ratnawati. 2011. Pendidikan alternatif untuk perempuan marginal di pedesaan. *Jurnal ilmu pendidikan*, 17 (4): 313-321. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/jip.v17i4.2734>
- Widiastuti, Novi. Prita Kartika. 2017. Penerapan Model kelompok Usaha kreatif islami (KUKIS) dalam pemberdayaan perempuan berbasis pondok pesantren. *Empowerment: Jurnal ilmiah program studi pendidikan luar sekolah*, 6 (2): 20-29. DOI: <https://doi.org/10.22460/empowerment.v6i2p20-29.546>
- Wiyata, A. Latief. 2006. *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Cetk. Kedua, Yogyakarta: LKiS.